

## KESADARAN BERPOLITIK MENUJU DESA DEMOKRASI 2024 PADA MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Abid Zamzami<sup>1)</sup>, Isdiyana Kusuma Ayu<sup>2)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
[abid\\_zamzami@unisma.ac.id](mailto:abid_zamzami@unisma.ac.id), [isdiyana@unisma.ac.id](mailto:isdiyana@unisma.ac.id)

### Abstrak

Terdapat beberapa keadaan yang mengurangi kesadaran berpolitik masyarakat untuk menuju desa demokrasi yaang maju akan pengetahuan dan perkembangan sesuai arus jaman yang hadir seperti sekarang ini, di Desa Benjor masyarakat tidak sepenuhnya berantusias menyabut demokarasi yang sesuai perkembangan untuk menuju desa yang maju akan demokrasi, sehingga dengan tidak adanya partisipasi masyarakat akan berdampak pada terganggunya demokrasi dalam bernegara serta pada tingkat program kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adanya tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024, Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Hasil dalam penelitian ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi pendidikan politik agar tingkat kesadaran berpolitik bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 lebih antusias dan membawa perubahan untuk Desa Benjor kedepanya.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Politik, Masyarakat Desa.

## ***POLITICAL AWARENESS TOWARDS DEMOCRACY VILLAGE 2024 IN THE COMMUNITY OF BENJOR VILLAGE, TUMPANG SUB-DISTRICT, MALANG DISTRICT***

### Abstract

*There are several conditions that reduce the political awareness of the community towards an advanced democratic village for knowledge and development according to the current era as it is today, in Benjor Village the community is not fully enthusiastic about welcoming democracy which is in accordance with developments towards a developed village for democracy, so by not the existence of public participation will have an impact on disrupting democracy in the state as well as at the work program level. The problem in this study is the level of understanding of the people of Benjor Village towards political awareness towards a democratic village in 2024, as well as the lack of community participation in picking up the flow of democracy in 2024 in Benjor Village, Tumpang District, Malang Regency. The type of research used is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. The results in this study provide an understanding of the community by providing education and socialization of political education so that the level of political awareness for the community in welcoming the 2024 democratic party is more enthusiastic and bringing change to Benjor Village in the future.*

**Keywords:** Democracy, Politics, Village Communities.

## A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Di Indonesia, partisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih, hak dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 448 Ayat (1), Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih, dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

Harus kita akui, kesadaran berpolitik merupakan progres yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri kepala pemimpin secara langsung, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan yang membuat rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan diadakannya pilkada secara langsung maka kedaulatan telah kembali sepenuhnya kepada rakyat.

Moment pemilihan ini dijadikan tolok ukur menilai partisipasi masyarakat. Kesadaran yang dibentuk melalui demokrasi merupakan salah satu pendukung partisipasi politik, selain daripada budaya politik dan pendidikan politik. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Politik adalah pengaturan urusan masyarakat melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari rakyat melalui pemilihan. Ini berarti yang akan menduduki tampuk kekuasaan ditentukan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merupakan lahan tempat lahirnya para pemimpin (Ayuni Nur Fatwa, 2016, p.1616).

Tingkat kesadaran politik diartikan bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Mariam Budiarto, 1989, p.22). Kesadaran berpolitik pada masyarakat desa khususnya tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam menentukan hak suaranya, akan tetapi kesadaran berpolitik masyarakat juga dilihat dari partisipasinya dalam mengempanyekan calon pemimpin yang akan di dukung.

Adanya semangat partisipasi politik masyarakat akan memberikan nuansa demokrasi yang menunjang hak-hak masyarakat untuk menentukan pilihannya, sesuai yang sudah diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar 1945. Tupoksi adanya kesadaran berpolitik dalam suatu masyarakat tidak hanya dilihat dari pasca pemilihan Pilpres, Pilgub, Pilkada, atau Pemilihan DPR, akan tetapi tupoksinya dilihat dari kesadaran berpolitik masyarakat dalam pemilihan Pilkades. Pesta demokrasi yang ada dilingkup perdesaan tidak kalah menarik dengan pemeliharaan kepala pemerintah di atasnya.

Dengan adanya kesadaran berpolitik masyarakat desa, akan menentukan keadaan wilayah yang dipilih untuk tahun-tahun berikutnya. Sepertihalnya yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, masyarakat desa dihadapkan dengan demokrasi yang menimbulkan arus politik yang juram sehingga menandakan partisipasi yang sangat antusias dari masyarakat. Antusiasnya masyarakat dalam berpolitik harus didorong dengan kesadaran masyarakat akan desa yang maju dari tangan pemimpin yang sesuai dengan arah tujuan desa benjor khususnya.

Akan tetapi, sejatinya terdapat beberapa keadaan yang mengurangi kesadaran berpolitik masyarakat untuk menuju desa demokrasi yaang maju akan pengetahuan dan perkembangan sesuai arus jaman yang hadir seperti sekarang ini, di Desa Benjor masyarakat tidak sepenuhnya berantusias menyabut demokarasi yang sesuai perkembangan untuk menuju desa yang maju akan demokrasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpastipasi dalam dunia politik dikarenakan pengetahuan masyarakat desa yang masih minim terkait demokrasi yang sejalan dengan politik, selain dari itu adanya pengaruh dari masyarakat lain untuk tidak berpastipasi dikarenakan tidak sejalanya pemikiran politik dengan bakal calon yang mengikuti kontestan demokrasi.

Karena pada dasarnya adanya ketidakminatan dari masyarakat desa dalam berpastisipasi dalam pemilihan umum tentunya akan berdampak pada tidak berjalanya rencana kegiatan jangan panjang ataupun jangka pendek dari para calon karena stabilitas politik yang berkurang dari masyarakat serta terganggunya demokrasi bernegara, hal ini harus dapat di atasi dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat desa dengan cara sosialisai berlanjut. Sehingga pemahaman yang sejalan terkait dengan politik menuju desa yang demokrasi akan terwujud dan demokrasi yang bermartabat berbabis pancisala akan dapat dijalankan sesuai amanat konstitusi negara indonesia. Pada ujungnya hal demikian akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat desa untuk menunjang desanya yang maju sesuai arus perkembangan zaman yang semakin modern.

Dengan demikian, sebagaimana uraian permasalahan yang sudah diuraikan oleh penulis demikian, maka terdapat beberapa pokok permasalahan diantaranya bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024? Serta apa faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moeloeng, 2011, p.6). Sebelum melaksanakan penelitian, pada penelitian kualitatif merumuskan masalah terlebih dahulu yang menjadi fokus penelitian. Akan tetapi, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih remang-remang, tidak teramati, dinamis, dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut (Sugiyono, 2015, p.20).

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan membawa pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Ahmad Tanzeh, 2011, p.65). Adapun jenis pendekatan penelitian ini dipaparkan secara deskriptif. Peneliti bersaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data di tingkat masyarakat tentang Pentingnya Pentingnya wawasan politik dari masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menuju desa demokrasi 2024.

### **1. Kegiatan dan Pelaksanaan**

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan atas hibah dari Institusi Unisma di bawah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang.

### **2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat**

Pengabdian ini dilaksanakan pada Desember Tahun 2022 dengan berlokasi Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Alasan pengambilan lokasi pengabdian ini didasari dengan banyaknya minat masyarakat terhadap pesta demokrasi di tahun 2024. Dengan banyaknya minat masyarakat terhadap pesta demokrasi maka harus diperkuat kesadaran politik dari masyarakat menuju demokrasi yang lebih baik.

**3. Mitra/Subjek Pengabdian**

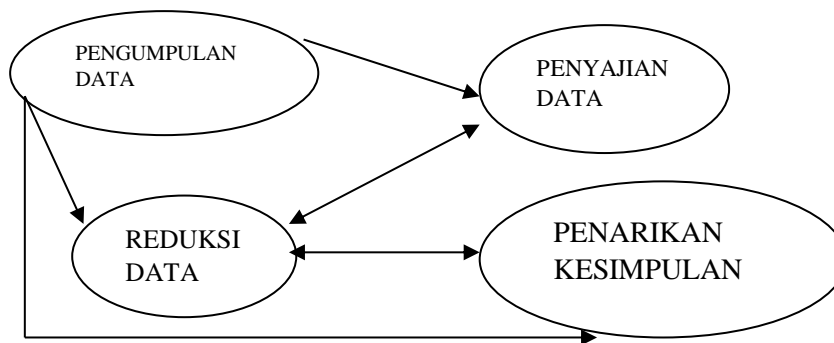
Mitra/subjek yang terdapat dalam pengabdian ini di antaranya adalah perangkat desa, masyarakat desa, organisasi masyarakat dan komunitas-komunitas yang terdapat diwilayah Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

**4. Prosedur**

Prosedur pengabdian ini menggunakan Teknik penelitian fenomenologi yang peneliti lakukan untuk menggali informasi dari subjek, seperti halnya pengalaman subjek, makna-makna dari pengalaman subjek. Informasi dari subjek dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari peneliti, sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola hasil penelitian sebagai keilmuan yang penting. Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah yang berdasarkan kenyataan lapangan (empiris).

Selanjutnya peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan bersama-sama dengan pengumpulan data. Sebenarnya pada waktu pertama kali memahami data berarti mulai menganalisis, sebab tanpa pemahaman data yang diperoleh, peneliti menemui kesukaran untuk mencari data berikutnya. Salah satu buku yang khusus menjelaskan teknik analisis data kualitatif adalah buku yang ditulis Miles dan Huberman. Dalam buku tersebut diuraikan komponen pokok dalam menganalisis data, yaitu *“data display”*, *“data reduction”* dan *“verification/conclusion drawing”* sebagaimana berikut.



Gambar 1. Flow Model of Analysis

Tiga komponen analisis yang berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Benjor Terhadap Kesadaran Berpolitik Menuju Desa Demokrasi Tahun 2024

Kesadaran politik adalah keadaan kesadaran seseorang secara penuh akan pengetahuan berbagai hal terkait proses politik dalam masyarakat. Menurut Almond dan Verba, seseorang dianggap memiliki kesadaran politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi output maupun input (Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984, p. 55). Input dalam hal ini meliputi tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat kepada pemerintah. Output berupa keputusan, tindakan atau hasil kebijakan pemerintah yang diterapkan. Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting tingginya tingkat partisipasi politik.

Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya diperintah maka orang itu akan menuntut akan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mariam Budiarto, 1989, p.369). Pada umumnya kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik, serta minat dan perhatiannya terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, kesadaran politik juga berkaitan dengan sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik. Penilaian seseorang terhadap pemerintah, dipercaya atau tidak, disukai atau tidak.

Kesadaran politik dijadikan salah satu ukuran untuk melihat budaya politik suatu negara bagi Gabriel Almond dan Sidney Verba. Dalam kesadaran politik, pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sistem politik berkaitan dengan komponen orientasi kognitif. Pada tahap pengetahuan dan pemahaman, pemilih pemula mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti bagaimana seseorang dapat mengetahui tatacara pemilihan umum, mengenal nama pemimpin politik serta kebijakan-kebijakan dari berita. Selanjutnya kesadaran politik pada tahap sikap berhubungan dengan orientasi afektif. Hal ini dilihat dari sikap atau perasaan suka atau tidak suka pemilih pemula pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Sikap tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemilih pemula merasa diperhatikan, diuntungkan, merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

Pada tahap tindakan atau perilaku merupakan hasil gabungan dari dua komponen orientasi afektif dan kognitif, yaitu orientasi evaluatif. Dalam tahap ini pemilih pemula dapat melihat dan menilai bagaimana kinerja pemerintah atau partai politik. Perilaku tersebut ada akibat hasil akhir dari pengetahuan dan pemahaman serta sikap terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Gabriel Almond dan Sidney Verba menjelaskan ada 3 pola kesadaran politik, (Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984, p. 56), yaitu :

- a. Kesadaran input adalah keadaan seseorang dengan sadar terlibat dalam sistem politik dan mengikuti atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Input dalam hal ini berupa dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Dalam bentuk tuntutan input dapat muncul dari pengaruh lingkungan atau dalam sistem politik itu sendiri. Dalam bentuk dukungan input menjadi tindakan atau orientasi yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik. Kesadaran input dapat diukur dari bagaimana mereka mengerti isi pemberitaan politik, memahami sistem pemilu, mengikuti rapat di masyarakat dan aktif dalam organisasi kepemudaan di masyarakat.
- b. Kesadaran output adalah keadaan seseorang dengan sadar mengetahui dan merasakan dampak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam kehidupannya. Dalam hal ini kesadaran output diukur melalui beberapa indikator, seperti pendapat pemilih pemula terhadap kebijakan pemerintah saat ini, pengetahuan mereka tentang peraturan pemerintah, dan perasaan mereka terkait kebijakan tersebut, kemampuan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kehidupan mereka.
- c. Penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini. Se jauh mana penerimaan informasi politik pemilih pemula dapat diukur melalui beberapa indikator, di antaranya apakah mereka mengenal nama pejabat publik, mengenal nama-nama menteri, nama-nama partai politik, dan kebebasan mereka dalam mengungkapkan opininya di depan umum.

Adanya beberapa pola kesadaran politik yang dibangun dalam memperkuat tingkat untuk partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatan untuk kedepannya salah satunya untuk kepentingan serta edukasi bagi masyarakat Desa Benjor dalam menyambut pentas demokrasi tahun 2024. Untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
- b. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah
- c. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik
- d. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik

Dari indikator capaian untuk mengukur dari segi kesadaran politik masyarakat, harus dapat dipahami bahwa masyarakat sebagai warga negara untuk berpartisipasi lebih intens agar perkembangan arus demokrasi tidak tertinggal, sehingga indikator demikian akan menjadi faktor positif untuk demokrasi yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antarlain sebagai berikut:

- a. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- b. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi dimasyarakat.

- c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
- d. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai peranan dalam mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Faktor-faktor ini pula dapat di jadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi sadar akan politik. Sebaliknya dalam demokrasi dewasa ini, tidak semua masyarakat mengikuti perkembangan arus politik serta mengikuti kegiatan politik melainkan masih banyak masyarakat minim tingkat pemahaman terhadap politik yang berkelanjutan. Dengan itu, sebgaimana halnya dalam pegabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Benjor untuk dapat berpartisipasi secara aktif kembali dalam menjemput demokrasi di tahun 2024, berikut sosialisasi kegiatan yang dilakukan:



Gambar 2. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Kesadaran Berpolitik Masyarakat Desa Benjor.

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Benjor masih Minim untuk kesadaran politik dalam menjemput demokrasi tahun 2024. Hal demikian juga selaras dengan pemahaman masyarakat Desa Benjor yang masih kurang terhadap kesadaran politik menuju desa demokrasi yang bermartabat dan sangat berpengaruh terhadap dampak dari kelancaran demokrasi. Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat Desa Benjor dikarenakan tidak adanya edukasi, sosialisasi ataupun pendidikan politik yang mewadahi masyarakat untuk mendapatkan wawasan pentingnya berpolitik demi kepentingan suatu daerah di masa depan. Selain daripada itu generasi muda yang kurang tertarik dengan demokrasi berpandangan bahwa politik hanya untuk kepentingan penguasa dan golongan tidak untuk masyarkat, sehingga pemahaman yang dimiliki masih terdoktrin untuk sebagian masyarakat.



Untuk itu, dengan adanya penelitian ini akan memberikan edukasi, sosialisasi untuk masyarakat Desa Benjor dalam menambah pemahaman bahwa dalam menyambut demokrasi diperlukan kesadaran berpolitik bagi masyarakat. Kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). Pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi merupakan suatu keharusan, kerana sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan keadaran diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik yang akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab. Kesadaran politik warga negara khususnya masyarakat desa benjor menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Dengan demikian, dalam hal ini setiap lapisan masyarakat desa benjor maupun organisasi masyarakat yang terhimpun didalamnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam konteks demokrasi yang akan datang di tahun 2024 dengan memberikan kejelasan darinya dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya masyarakat agar bisa mempunyai wawasan luas akan politik agar segala kecurangan dapat diminimalisir sedemikian rupa, dan tidak ada lagi kecurangan dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat Desa Benjor Dalam Menjemput Arus Demokrasi**

Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bentuk partisipasi politik paling minimal sebagai warga negara. Partisipasi politik dalam sebuah negara adalah hal yang substansial. Salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi tersebut dilakukan. Diwilayah negara-negara demokratis,

pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama, untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, dalam hal ini dimanifestasikan melalui pemilihan umum. Dan keterlibatan masyarakat sebagai warga negara telah memnuhi syarat (para pemilih), pada suatu tahap atau beberapa tahap kegiatan dalam pemilu itulah yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Partisipasi politik dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Baik gagal mau pun berhasil dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerangka tersebut tetap merupakan bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri (*self motion*), dan ada pula dilakukan karena desakan, manipulasi, maupun mobilisasi pihak lain, masalah partisipasi politik aktif bukan saja berhenti dalam pengertian keikutsertaan, karena tidak sedikit warga masyarakat yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali, atau hanya sedikit perhatiannya pada kehidupan politik. Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan tanpa menggunakan perantara maupun pihak ketiga.

Pada dasarnya, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara. Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan Herbert McClosky bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 1989, p.367).

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi 4 (empat) tipe (Rahman, 2007, p.289) antara lain yaitu:

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

- c. Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.
- d. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik

Dalam kegiatan politik, yang berperan aktif dalam partisipasi politik adalah masyarakat, karena masyarakat itu sendiri merupakan subyek pokok dari kegiatan politik. Suatu masyarakat haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam menentukan pilihan dalam kegiatan politik. Tujuan dari pada hal itu ialah agar masyarakat yang ikut dalam berpartisipasi politik bisa secara aktif memberikan pendapat pendapat terdapat keputusan yang dibuat oleh pemerintah. bahwa bentuk kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk partisipasi politik, yang lainnya bisa berupa diskusi politik ataupun juga ikut serta dalam sebuah kampanye, tetapi semua itu ditentukan dengan cara pemungutan suara pada saat pemilihan yang akan menentukan warna dari demikrasi mendatang.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan sebuah bentuk dalam proses kedaulan rakyat yang menentukan jalannya sistem pemerintan dan sistem politik yang ada, walaupun itu hanya berbentuk pemeberian suara. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik masyarakat, diamana apabila semakin tinggi tingkat kesadraan kesadaran politiknya maka itu akan memebawa dampak yang lebih baik dalam segi memberikan pengawasan terhadap kinerja badan pemerintahan. Menurut Surbakti membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, (A. Aco Agus, 2020, P.113-114,) yaitu:

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi

kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif dan tertekan (apatis).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat yaitu pengetahuan politik. Pengetahuan politik salah satunya dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan dengan cara sosialisasi politik oleh lembaga, partai, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan politik masyarakat, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, agama, lingkungan pergaulan, serta media massa yang digunakan oleh masyarakat. Menurut Andriyus keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal meliputi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan kesadaran politik. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi peranan pemerintah, peranan partai politik, peranan media massa, dan perilaku calon legislatif (A. Aco Agus, 2020, 114).

Pengetahuan dan pemahaman tentang politik dapat diperoleh dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu berada. Sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi sosialisasi politik itu sangat penting sebab sosialisasi politik meningkatkan pengetahuan politik dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik juga diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), (Surbakti Ramlan, 2010, p.184.185).

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk itu, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak

bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah (Miriam Budiardjo, 2008, p.369).

Perasaan sadar seperti demikian dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Dalam negara-negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dalam alampikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatanitu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Partisipasi politik yang masih kurang dari masyarakat dalam konteks pemilihan umum menyebabkan ketidakstabilan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024, hal demikian terjadi juga pada masyarakat Desa Benjor yang dimana dalam menjemput pesta demokrasi masih kurang antusiasnya masyarakat dalam berdemokrasi. Faktor kurangnya antusias masyarakat demikian di karenakan beberapa faktor diantaranya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Desa Benjor Dalam Menjemput Arus Demokrasi 2024.**

No.	Faktor	Tingkat Pengaruh
1.	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi	Tinggi
2.	Kurangnya minat masyarakat terhadap calon yang mengikuti pesta demokrasi.	Sedang
3.	Kurangnya perubahan terhadap masyarakat pasca demokrasi berlangsung	Tinggi
4.	Demokrasi tidak dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupan secara keberlanjutan.	Sedang
5.	Kurangnya peranan pemerintah	Sedang
6.	Kurangnya peranan generasi muda dalam mengikuti demokarasi	Tinggi
7.	Rendahnya tingkat pendidikan	Sedang

Sumber : data primer, diolah 2024.

Kurangnya kesadaran politik dari masyarakat dalam menyambut arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor sebagaimana hasil observasi peneliti yang ditemukan di lokasi penelitian, dikarenakan masih harusnya pembenahan dari sistem pemerintah yang berwenang dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput demokrasi harus didasari dengan adanya minat serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam membenahi banyaknya dampak buruk dari tidak adanya peranan masyarakat dalam memilih pemimpin yang mengikuti konteks demokrasi.

Ketidaktertarikan masyarakat terhadap pesta demokrasi, harus dapat dibenahi oleh pemerintah dikarenakan dampak dari adanya hal demikian sangat berpengaruh untuk kemajuan

daerah untuk masa yang akan datang. Permasalahan yang sering dihadapi akan sering berlanjut disetiap demokrasi berlangsung, maka diperlukan suatu bentuk terobosan-terobosan untuk mencegah hal demikian terus berlanjut. Langkah yang perlu dibenahi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni dengan melaksanakan sosialisai berlanjut. Sehingga pemahaman yang sejalan terkait dengan politik menuju desa yang demokrasi akan terwujud dan demokrasi yang bermartabat berbabis pancisala akan dapat dijalankan sesuai amanat konstitusi negara indonesia.

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh penelitian terhadap permasalahan tersebut yakni dengan melakukan observasi terlebih dahulu dengan melihat kondisi permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat yang tidak memiliki minat terhadap pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 serta melakukan sosialisai berlanjut untuk memberikan edukasi terhadap setiap elemen masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Sehingga dengan adanya sosialisai berlanjut dapat mengatasi masalah-masalah yang menghambat minat masyarakat terhadap pesta demokrasi.

#### **D. SIMPULAN**

Bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024 masih memiliki pemahaman yang kurang dan sangat berpengaruh terhadap dampak dari kelancaran demokrasi. Kurangnya pemahaman yang dimiliki dikarenakan tidak adanya edukasi, sosialisai ataupun pendidikan politik yang mewadahi masyarakat untuk mendapatkan wawasan pentingnya berpolitik demi kepentingan suatu daerah di masa depan, serta generasi muda yang kurang tertarik dengan demokrasi berpandangan bahwa politik hanya untuk kepentingan penguasa dan golongan tidak untuk masyarkat, sehingga pemahaman yang dimiliki masih terdoktrin untuk sebagian masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi, kurangnya minat masyarakat terhadap calon yang mengikuti pesta demokrasi, kurangnya perubahan terhadap masyarakat pasca demokrasi berlangsung, demokrasi tidak dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupan secara keberlanjutan, kurangnya peranan pemerintah serta kurangnya peranan generasi muda dalam mengikuti demokarasi.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas dukungan finansial yang luar biasa. Kontribusi besar yang telah diberikan oleh lembaga ini telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan proyek pengabdian kami. Dana yang disediakan oleh Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga representasi dari komitmen dan dukungan lembaga terhadap pengembangan masyarakat. Dengan dukungan ini, kami dapat melaksanakan program pengabdian dengan lebih efektif, memberikan manfaat maksimal, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga kerjasama ini tidak hanya menjadi awal yang baik, tetapi juga menjadi landasan untuk kerjasama yang lebih erat di masa depan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas dukungan yang luar biasa ini. Semoga kebaikan ini terus menjadi berkah bagi kemajuan bersama.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- A. Aco Agus, Dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019-2024, *Supremasi*, Vol. 15, (No. 2). halaman. 113-114.
- Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Tulungagung: Teras.
- Ayuni Nur Fatwa (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Paser Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4. (No. 4). halaman. 1616.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Lexy J. Moeloeng (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Budiarto. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti Ramlan (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.